

Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia (Zaman Orde Baru dan Reformasi)

Saiful Anwar^{1*} dan Marlina^{2*}

^{1 2}STKIP Nurul Huda

*E-mail: *Saifulanwar55357@gmail.com, **marlina@stkipnurulhuda.ac.id

Abstrak

Pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya berinovasi dan di perbaharui. Karena dengan kemajuannya zaman pada saat ini jika pendidikan tidak berinovasi dan di perbaharui maka nantinya tidak akan bisa mengimbangi kemajuan zaman yang serba teknologi. Maka dari itu pemerintah juga ikut berperan penting dalam kemajuan pendidikan, kebijakan yang di ambil pemerintah di tuntut untuk bisa memperbaharui pendidikan agar bisa lebih baik dan lebih maju. Dengan semakin bertambahnya zaman pastinya juga berdampak pada pendidikan. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama ditujukan pada pendidikan sosialisme Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan demikian setiap era zaman pasti aka nada kebijakan dari pemerintah yang memimpin untuk menjadi lebih baik dan lebih maju..

Kata kunci: *Kebijakan Pemerintah, Orde Baru, Reformasi*

PENDAHULUAN

Bicara Pendidikan pada zaman Orde baru dan Reformasi, Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu Negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang di pertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena untuk mengimbangi perkembangan zaman. Dengan lahirnya Orde baru dan di lanjutkan oleh zaman Reformasi dan tumpasnya PKI, Maka mulailah era baru dalam usaha meningkatkan pendidikan dan usaha menegakan cita-cita Pemuda-Pemudi Indonesia yang tercantum dalam proklamasi 17 agustus 1945. Ada banyak usaha yang membutuhkan kerja keras untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, tapi dalam masa orde baru ini belum sepenuhnya sempurna kemudian pada zaman Selanjutnya yaitu zaman Reformasi lah mulai ada sedikit perbaikan contohnya yaitu kurikulum harus di tinjau dalam Lima (5) tahun sekali.

Pendidikan yang baik dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi bangsa itu sendiri, Tak terkecuali dengan visi dan misi guru yang bermutu dan professional juga nantinya akan di harapkan membawa anak didik yang juga baik.

METODE/EKSPERIMEN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka murni (*library research*) dan pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan jenis kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, karena peneliti akan menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam pada masa orde baru dan reformasi. Kemudian mengidentifikasi titik temu dari koleksi data-data primer yang diperoleh, serta melibatkan data-data sekunder, termasuk opini peneliti sendiri. Pengumpulan data berupa teknik dokumenter atau studi dokumenter. Teknik / cara menganalisa data dalam penelitian ini adalah kajian isi. pengertian kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Pada Masa Orde Baru

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka itulah maka pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idiilnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijadikan landasan idiil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945-1950 negara Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Karena itulah Pancasila mantap menjadi landasan idiil pendidikan di Indonesia. (As'ad Muzammil, 2016:188)

Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaannya langsung menyusun untuk mewujudkan cita-cita anak bangsa yaitu berpendidikan, oleh karena itu maka segeralah petinggi-petinggi yang pada saat itu di pelopori oleh Ir. Soekarno untuk melakukan rapat untuk membentuk Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan pada saat itu, untuk mengubah pendidikan yang di bawa oleh penjajah dan juga menyesuaikan oleh zaman yang baru. Maka terpilihlah Menteri yang Pertama kali yaitu KI Hajar Dewantara.

KI Hajar Dewantara kemudian mengintruksikan untuk umum yang berisikan untuk kepala sekolah dan guru-guru (As'ad Muzammil, 2016:189), yaitu :

- a. Mengibarkan Sang Merah Putih tiap-tiap hari di halaman sekolah.
- b. Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
- c. Menghentikan pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyanyian Kimigayo lagu kebangsaan Jepang.
- d. Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang, serta segala upacara yang berasal dari pemerintah balatentara Jepang.
- e. Memberi semangat kebangsaan kepada semua murid.

Pada masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan dimana rezim dapat bertahan lebih lama dan stabil jika dibandingkan dengan rezim Orde Lama. Kestabilan politik tersebut juga berpengaruh pada kestabilan program dan pelaksanaan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari institusi, lembaga, departemen, dan kementerian yang mengurus pendidikan relatif stabil, yaitu hanya satu nama institusi yang menggantikan nama institusi Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Departemen ini tidak pernah diganti selama masa pemerintahan Orde Baru (1966 – 1998). Salah satu ciri pendidikan Orde Baru adalah bagaimana bentuk dan implementasi atau kebijakan pendidikannya selalu dikaitkan dengan persoalan pembangunan dan ekonomi. Intinya, lulusan pendidikan di zaman Orde Baru dituntut untuk bisa bekerja.

Pendidikan pada masa Orde Baru dimulai dengan lahirnya Ketetapan MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 bab II pasal 3, mencantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia, dimaksudkan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan manusia Pancasila sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapat pengaruh dari Manipol USDEK pada zaman Orde Lama, pemurnian semangat Pancasila dianggap sebagai jaminan tegaknya Orde Baru. (Mahar Ariffianto, 2015:393)

Kemudian langkah Pemertintah tidak hanya itu, untuk mengevaluasi pendidikan di Indonesia

agar lebih baik lagi, MPRS melakukan sidang beberapa kali untuk memberikan keputusannya di dalam untuk memajukan pendidikan agama agar lebih baik yaitu mewajibkan pendidikan agama dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Dalam sidang MPR yang menyusun GBHN tahun 1973 hingga sekarang, selalu di tegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah di kembangkan sejak taman kanak-kanak. Dengan demikian, setelah merdeka pendidikan islam mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam system pendidikan nasional. (H.Ali, dkk.,2017:82)

Kemudian setelah terjadi keputusan dari MPR sedikit demi sedikit pesantren yang dulunya enggan menerima yang namanya moderditas lambat laun membuka diri untuk membuka sekolah umum seperti apa yang di lakukan pemerintah, pesantren yang dulunya hanya belajar di surau sekarang mereka membuka madrasah sekolah yang lebih besar dan bahkan membuka sekolah umum seperti SMK dan lainnya. Bahkan siswa yang lulus dari madrasah yang di naungi oleh pesantren di berikan Ijazah yang seperti di berikan oleh sekolah pemerintah, selain daripada itu sekolah-sekolah umum yang di naungi pemerintah sekarang sudah di berikan 2 jam untuk pendidikan agama. Pada masa Orde Baru ini pemerintah juga membentuk kurikulum, yaitu :

Kurikulum 1968 ; dalam kurikulum ini siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif, hanya mengapal teori saja tanpa ada pengaplikasiannya dari teori tsb.

Kurikulum 1975 ; Di kurikulum ini peran guru menjadi penting, karena satiap guru wajib memberikan rincian perencanaan sebelum mengajar atau harus jelas jelas tujuan dalam belajar mengajar. Dengan proses belajar seperti ini menjadi sistematis dan bertahap.

Kurikulum 1984 ; Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokan dan mendiskusikan hingga melaporkan. Kurikulum ini membuat guru menjadi fasilitator.

Kurikulum 1994 ; Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu terutama KUR.1975 dan 1984. di kurikulum ini juga pemerintah memasukan muatan Lokal yaitu bahasa daerah masing-masing.

Dapat kita simpulkan dari melihat beberapa kurikulum di atas setelah zaman kemerdekaan, ada perkembangan yang sangat pesat dari pendidikan di Indonesia. Di zaman orde baru pemerintah mampu memberikan kebijakan dalam segi pendidikan umum dan juga pendidikan islam, buktinya pemerintah juga peduli pesantren dengan menstarakan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum dan juga memberikan pembaharuan-pembaharuan pada kurikulumnya.

b. Kebijakan Pemerintah pada Masa Reformasi

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model "Manajemen Berbasis Sekolah". Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem "Kurikulum Berbasis Kompetensi". (Yudi hartono, 2016: 39)

Otonomi pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 adalah Tahun 2003 terungkap pada hak dan kewajiban warga negara, orangtua, masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan program evaluasi pendidikan. Otonomi pendidikan berarti memberikan suatu otonomi dalam fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Otonomi disini maksudnya yaitu memberikan suatu kewenangan terhadap suatu lembaga pendidikan dengan tujuan untuk memandirikan lembaga pendidikan tersebut. Dalam otonomi pendidikan terdapat istilah manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat. Manajemen berbasis sekolah adalah sistem manajemen yang bertumpu pada situasi

dan kondisi serta kebutuhan sekolah setempat. Sedangkan pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola secara langsung oleh masyarakat, dan didasarkan atas inisiatif masyarakat, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. (Drs.Aceng. 2016:141)

Kurikulum SLTP dan SMU juga menekankan keseragaman kemampuan intelektual siswa. Mereka diajar dengan metode yang sama, kebanyakan metode ceramah, yang menempatkan siswa hanya sebagai pendengar pasif. Mereka juga diwajibkan mengikuti semua mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum. Menurut Drost (1998) di Eropa dan Australia kurikulum seperti di SLTP dan SMU kita diikuti oleh 25% sampai 30% siswa pandai. Di Indonesia kurikulum seberat itu diikuti oleh 100% anak Indonesia. Jadi, sekitar 70% siswa SLTP dan SMU akan gagal. Akibatnya, hilang semangat belajar dan tumbuh rasa frustrasi. Mutu pengajaran yang diberikan oleh guru cenderung menurun, karena pada umumnya guru kurang waktu untuk membuat persiapan dan memberikan penjelasan akibat saratnya muatan kurikulum di samping tugas administratif yang harus diselesaikan, misalnya pembuatan laporan bulanan. Selain itu para guru masih menganggap dirinya (atau dianggap) sebagai satu-satunya sumber belajar sehingga mereka kurang memanfaatkan sumber belajar lain (media teknologi, para pakar di lingkungan sekitar) untuk menunjang pengajarannya. (Veronica L. Diptoadi, 1999: 163-164)

Menurut saya mengenai pendapat-pendapat di atas saya setuju dengan pendapat Dost di atas sebelum di keluarkannya kurikulum 2013 yang memang pembelajarannya sudah baik. Dari kurikulum pertama hingga kurikulum terakhir 2006 (KTSP) kemarin saya mengamati bahwa guru masih menjadi satu-satunya panutan ilmu bagi siswa yang masih di bangku SLTA ke bawah, itulah yang mempengaruhi kinerja keaktifan siswa menjadi menurun. Akibatnya ketika si anak melanjutkan ke jenjang tertinggi (KULIAH) maka siswa sedikit mengalami kesulitan dalam keaktifannya ada yang merasa masih malu atau lain sebagainya.

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah kita ulas di atas dapat kita simpulkan bahwa :

Pada Masa Orde Baru : Salah satu ciri pendidikan Orde Baru adalah bagaimana bentuk dan implementasi atau kebijakan pendidikannya selalu dikaitkan dengan persoalan pembangunan dan ekonomi. Intinya, lulusan pendidikan di zaman Orde Baru dituntut untuk bisa bekerja.

Pada Masa Reformasi : Kurikulum SLTP dan SMU juga menekankan keseragaman kemampuan intelektual siswa. Mereka diajar dengan metode yang sama, kebanyakan metode ceramah, yang menempatkan siswa hanya sebagai pendengar pasif. Mereka juga diwajibkan mengikuti semua mata pelajaran yang tercantum dalam kurikulum.

Di zaman orde baru pemerintah mampu memberikan kebijakan dalam segi pendidikan umum dan juga pendidikan islam, buktinya pemerintah juga peduli pesantren dengan menstarakan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum dan juga memberikan pembaharuan-pembaharuan pada kurikulumnya. Pada masa reformasi pendidikan islam memiliki tempat dalam kurikulum pendidikan umum walaupun hanya 2 jam pelajaran, dan pendidikan islam di Madrasah mulai mendapat perhatian dari pemerintah berupa bantuan pendidikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada STKIP Nurul Huda dan Pengelola Jurnal Al I'tibar atas terpublikasinya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, S. M. L. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DARI ORDE LAMA SAMPAI ORDE BARU.

Ariffianto, M. (2015). Profesionalisme Guru SMA di Lamongan pada Masa Orde Baru Pelita V & VI (Tahun 1989 sampai 1998). *Avatara*, 3(3).

H.Ali, dkk., 2017. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Hartono, Y. (2016). Pendidikan Dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan Di Indonesia Masa Orde Lama Hingga Reformasi). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), 35-45.

Diptoadi, V. L. (1999). Reformasi Pendidikan di Indonesia Menghadapi Tantangan Abad 21. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 6(3), 101691.